

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRI WULAN I TAHUN 2026
PADA
PENGADILAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



APRIL 2026

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI (IPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan ini menyatakan bahwa **Laporan Hasil Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK pada Pengadilan Negeri Yogyakarta** telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diperoleh:

- 1. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) : 95,55%**
- 2. Kategori Mutu Pelayanan : A (Sangat Baik)**

Demikian lembar pengesahan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, **21** April 2026

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta


SYAFRIZAL, S.H

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
BAB I KUESIONER SURVEI.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud Dan Tujuan.....	1
3. Landasan Hukum	2
4. Rencana Kerja	2
A. Persiapan	2
B. Pelaksanaan Pengumpulan Data.....	2
C. Metode Survei	3
BAB II METODOLOGI SURVEI.....	4
A. Kriteria Responden	4
B. Data Umum Responden.....	5
1. Tingkat pendidikan responden.....	5
2. Pekerjaan responden.....	5
3. Domisili responden.....	6
4. Kelompok usia responden	7
C. Metode Pencacahan.....	7
D. Metode Pengolahan Data Survei.....	7
E. Metode Penelitian	9
F. Populasi Dan Sampel	9
G. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	9
H. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	9
I. Teknik Analisis Data.....	9
J. Tahapan pelaksanaan	10
BAB III PENGOLAHAN DATA SURVEI.....	12
A. Analisis Data Survei.....	12
1. Indikator Pelayanan Sesuai Prosedur	12
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	13
3. Indikator Menjual Pengaruh	14
4. Indikator Transparansi Biaya.....	15
5. Indikator Transaksi Rahasia/Pungutan Liar	15
6. Indikator Hadiah.....	16
7. Indikator Transparansi Pembayaran	17

8. Indikator Percaloan.....	18
9. Indikator Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme	19
10. Indikator Intervensi Perkara.	20
B. Tindak Lanjut Hasil Survei.....	21
C. Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah	22
Tindak Lanjut :	23
D. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	24
BAB IV DATA SURVEI.....	26
A. Data Responden	26
B. Data Dukung Lainnya	26
C. Kesimpulan	27
D. Rekomendasi.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 4. Tingkat pendidikan responden.....	5
Tabel 5. Jenis pekerjaan responden.....	6
Tabel 6. Domisili Responden.....	6
Tabel 7. Usia responden.....	7
Tabel 5. Tabel Sampel Morgan dan Krejcie	8
Tabel 1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas	10
Tabel 2. Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi	11
Tabel 3. Nilai Persepsi	11
Tabel 8. Indeks pada indikator Pelayanan Sesuai Prosedur.....	12
Tabel 9. Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan	13
Tabel 10. Indeks pada indikator menjual pengaruh	14
Tabel 11. Indeks pada Indikator Transparansi Biaya.....	15
Tabel 12. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia	16
Tabel 13. Indeks pada Indikator Hadiah	16
Tabel 14. Indeks pada Transparansi Pembayaran	17
Tabel 15. Indeks pada indikator Percaloan	18
Tabel 16. Indeks pada indikator Praktek KKN	19
Tabel 17. Indeks pada indikator Intervensi Perkara.....	20

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden	5
Grafik 2. Pekerjaan Responden.....	6
Grafik 3. Domisili Responden	6
Grafik 4. Usia Responden	7
Grafik 5. Indikator Pelayanan Sesuai Prosedur	12
Grafik 6. Penyalahgunaan Jabatan	13
Grafik 7. Menjual Pengaruh.....	14
Grafik 8. Indikator Transparansi Biaya.....	15
Grafik 9. Transaksi Rahasia	16
Grafik 10. Tambahan Hadiah.....	17
Grafik 11. Indikator Transparansi Pembayaran	18
Grafik 12. Transparansi Pembayaran.....	18
Grafik 13. Indikator Percaloan	19
Grafik 14. Intervensi Perkara	20

BAB I

KUESIONER SURVEI

1. Latar Belakang

Sistem penyelenggaraan pemerintahan disetiap Kementerian / Lembaga (K/L) diharuskan berorientasi sepenuhnya terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, setiap K/L diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Dalam rangka menilai komitmen terhadap pencegahan korupsi, Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap K/L. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai unit eselon I penyelenggara pelayanan publik, maka penting dilakukan survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagai dukungan dan peran aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Indeks IPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi untuk instansi pemerintah di Indonesia yang dikembangkan oleh *Transparency International Indonesia*. Hasil survei dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk peningkatan kualitas layanan serta mewujudkan pelaksanaan *good governance*. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

4. Rencana Kerja

A. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- Jumlah Responden.
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

B. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan

sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

C. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun). Survei dilakukan secara Oline Menggunakan Aplikasi siSuper Badilum.

BAB II

METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Responden dalam Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah pihak yang pernah menerima layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan memenuhi kriteria tertentu agar hasil survei mencerminkan kondisi yang objektif dan akurat.

1. Kriteria Umum Responden

Responden survei harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Pernah menerima layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah
- Mampu memberikan penilaian secara objektif terhadap layanan yang diterima
- Mengisi kuesioner secara mandiri tanpa intervensi pihak lain

2. Jenis Responden

Responden dapat berasal dari berbagai kelompok pengguna layanan, antara lain:

- Pencari keadilan (para pihak berperkara)
- Kuasa hukum / advokat
- Saksi atau pihak terkait perkara
- Masyarakat umum yang menggunakan layanan pengadilan
- Pengguna layanan administrasi (misalnya pengambilan salinan putusan, informasi perkara, dll)

3. Kriteria Khusus

Untuk menjamin kualitas data, responden juga harus:

- Tidak memiliki konflik kepentingan dengan petugas yang dilayani
- Mengisi survei berdasarkan pengalaman langsung (bukan opini pihak lain)
- Mengisi kuesioner dalam periode waktu survei yang ditentukan

4. Jumlah Responden

Jumlah responden disesuaikan dengan:

- Jumlah pengguna layanan dalam periode survei
- Standar minimal jumlah responden dalam survei pelayanan publik
- Kebutuhan analisis yang representatif

5. Prinsip Pengisian

Dalam pengisian kuesioner, responden diharapkan:

- Memberikan jawaban secara jujur dan objektif
- Tidak dipengaruhi oleh pihak manapun
- Mengisi seluruh pertanyaan yang tersedia

B. Data Umum Responden

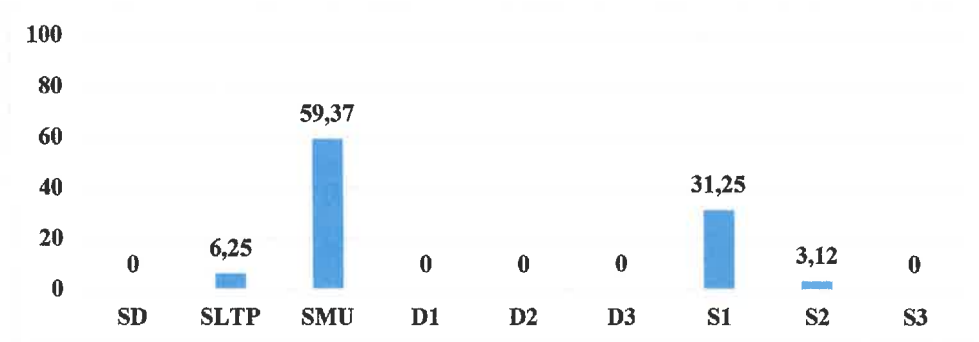
1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mayoritas memiliki latar pendidikan SMU sebanyak 19 orang atau 59,37% dari 32 responden.

Tabel 1. Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan terakhir	Frekuensi	%
1	SD	0	0
2	SLTP	2	6,25
3	SMU	19	59,37
4	D1	0	0
5	D2	0	0
6	D3	0	0
7	S1	10	31,25
8	S2	1	3,12
9	S3	0	0
Jumlah		32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 1. Tingkat Pendidikan Responden

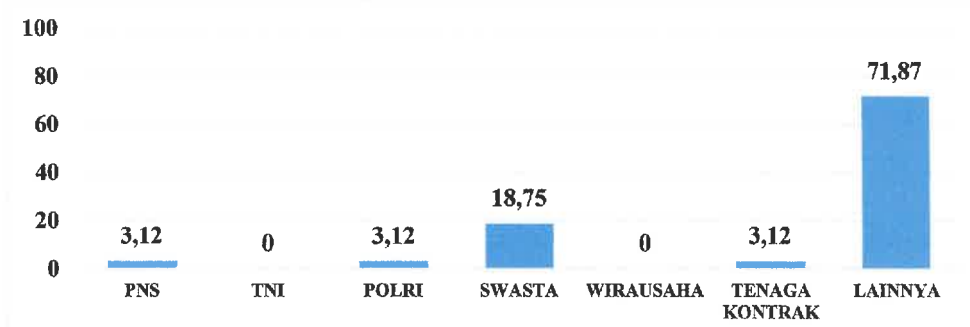
2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 23 responden atau 71,87% dari 32 responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki pekerjaan *lainnya*.

Tabel 2. Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	1	3,12
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	3,12
4	SWASTA	6	18,75
5	WIRAUSAHA	0	0
6	TENAGA KONTRAK	1	3,12
7	LAINNYA	23	71,87
Jumlah		32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 2. Pekerjaan Responden

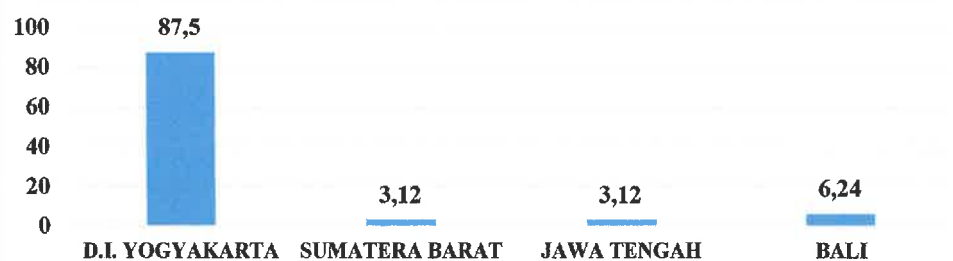
3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 28 responden atau 87,5% dari 32 responden.

Tabel 3. Domisili Responden

No.	Wilayah Domisili	Frekuensi	%
1	D.I. YOGYAKARTA	28	87,5
2	SUMATERA BARAT	1	3,12
3	JAWA TENGAH	1	3,12
4	BALI	2	6,24
Jumlah		32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 3. Domisili Responden

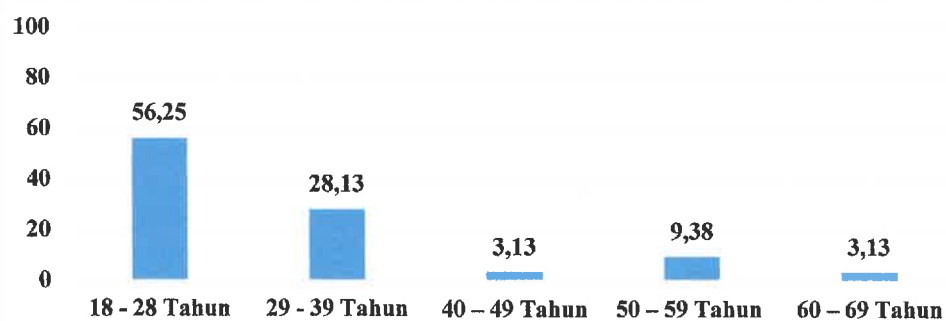
4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 18 tahun s/d 28 tahun, yaitu 18 orang atau 56,25% dari 32 responden.

Tabel 4. Usia responden

No	Usia	Frekuensi	%
1	18 - 28 Tahun	18	56,25
2	29 - 39 Tahun	9	28,13
3	40 - 49 Tahun	1	3,13
4	50 - 59 Tahun	3	9,38
5	60 - 69 Tahun	1	3,13
Jumlah		32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 4. Usia Responden

C. Metode Pencacahan

Data pada penelitian ini diambil dengan instrument online berupa kuesioner dengan <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

D. Metode Pengolahan Data Survei

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, dimana datanya berupa angka-angka dan dianalisis dengan teknik analisis statistik deskriptif. Guna melengkapi hasil analisis, disajikan juga analisis kuantitatif sebagai pelengkap.

Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, antara lain: pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara, KPAI, dll. Sampel pada penelitian ini diambil dengan menggunakan *Tabel Sampel Morgan dan Krejcie*. Dalam menentukan besarnya sampel yaitu menggunakan tabel Krejcie. Krejcie dalam melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel yang diperoleh itu mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi.

Untuk memudahkan pengambilan sampel tanpa menghitung, dapat melihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Tabel Sampel Morgan dan Krejcie

<i>N</i>	<i>S</i>	<i>N</i>	<i>S</i>	<i>N</i>	<i>S</i>
10	10	220	140	1.200	291
15	14	230	144	1.300	297
20	19	240	148	1.400	302
25	24	250	152	1.500	306
30	28	260	155	1.600	310
35	32	270	159	1.700	313
40	36	280	162	1.800	317
45	40	290	165	1.900	320
50	44	300	169	2.000	322
55	48	320	175	2.200	327
60	52	340	181	2.400	331
65	56	360	186	2.600	335
70	59	380	191	2.800	338
75	63	400	196	3.000	341
80	66	420	201	3.500	346
85	70	440	205	4.000	351
90	73	460	210	4.500	354
95	76	480	214	5.000	357
100	80	500	217	6.000	361
110	86	550	226	7.000	364
120	92	600	234	8.000	367
130	97	650	242	9.000	368
140	103	700	248	10.000	370
150	108	750	254	15.000	375
160	113	800	260	20.000	377
170	118	850	265	30.000	379
180	123	900	269	40.000	380
190	127	950	274	50.000	381
200	132	1000	278	75.000	382
210	136	1.100	285	100.000	384

E. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Anti Persepsi Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

F. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

G. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

H. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 bulan melalui aplikasi *siSUPER* dengan responden ditentukan minimal 30 responden.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

J. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 6. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 7. Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Pelayanan Sesuai Prosedur
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Informasi Biaya
5	Pungutan Liar
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Praktik KKN
10	Intervensi Perkara

Tabel 8. Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III PENGOLAHAN DATA SURVEI

A. Analisis Data Survei

Dalam rangka mengevaluasi tingkat integritas serta persepsi masyarakat terhadap praktik anti korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah dilakukan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK). Analisis terhadap data survei ini bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi tingkat persepsi masyarakat terhadap potensi praktik korupsi
- Mengetahui kekuatan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Menentukan prioritas perbaikan berdasarkan unsur dengan nilai terendah

Data yang diperoleh dari hasil survei diolah dan dianalisis secara kuantitatif berdasarkan nilai rata-rata masing-masing unsur. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap hasil tersebut dengan mengacu pada prinsip-prinsip **transparansi, akuntabilitas, dan integritas** sebagai pilar utama dalam pembangunan Zona Integritas. Analisis data survey dapat kami tampilkan sebagai berikut :

1. Indikator Pelayanan Sesuai Prosedur

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator Manipulasi Peraturan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Indeks pada indikator Pelayanan Sesuai Prosedur

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Sesuai	1	0	0
2.	Jarang Sesuai	2	0	0
3.	Sering Sesuai	3	0	0
4.	Selalu Sesuai	4	32	100
Jumlah			32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut: ini.



Grafik 5. Indikator Pelayanan Sesuai Prosedur

Dari 32 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 32 responden. Dan dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 100%.

Menurut hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* pada Perode Triwulan I Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut:

Pelayanan Sesuai Prosedur	
Jumlah	128
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/10)	0,400

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bersih dari *Manipulasi Peraturan*.

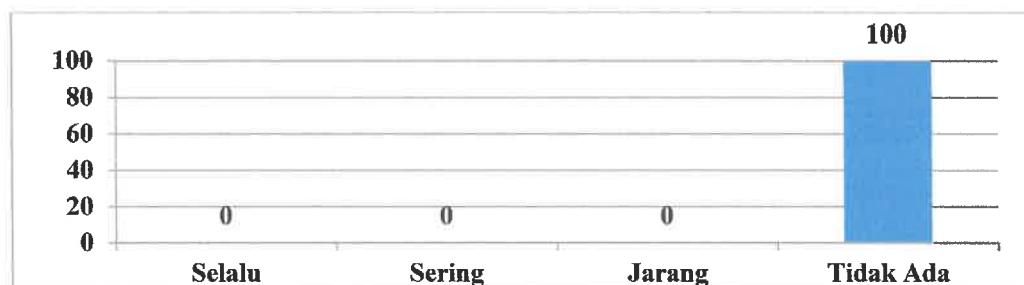
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 10. Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	32	100
Jumlah			32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini.



Grafik 6. Penyalahgunaan Jabatan

Dari 32 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 32 responden. Dan dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 100%.

Menurut hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* pada Perode Triwulan I Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut :

PENYALAHGUNAAN JABATAN	
Jumlah	128
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/10)	0,400

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bersih dari *Manipulasi Peraturan*.

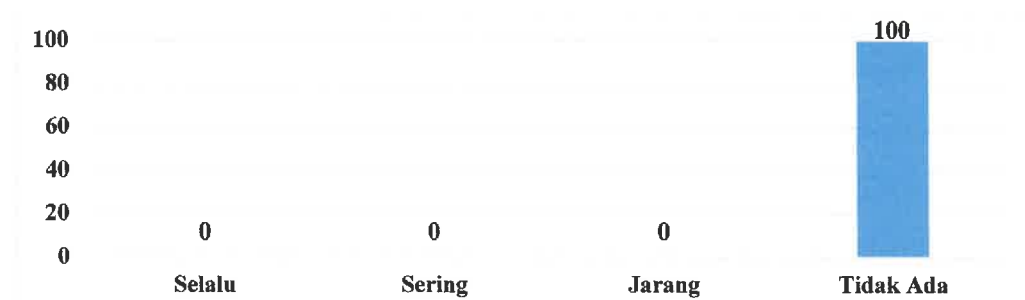
3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator Menjual Pengaruh menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 11. Indeks pada indikator menjual pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	32	100
Jumlah			32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 7. Menjual Pengaruh

Dari 32 responden yang menjawab *tidak ada* sebanyak 32 responden. Dan dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 100%.

Menurut hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* pada Perode Triwulan I Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut :

Menjual Pengaruh	
Jumlah	128
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	4,000
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/10))	0,400

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 4,000 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bersih dari *Menjual Pengaruh*.

4. Indikator Transparansi Biaya

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator Transparansi Biaya menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 12. Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Ada	1	3	9,37
2.	Jarang	2	0	0
3.	Sering	3	0	0
4.	Selalu	4	29	90,62
Jumlah			32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 8. Indikator Transparansi Biaya

Menurut hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* pada Perode Triwulan I Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut :

Transparansi Biaya	
Jumlah	119
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	3,719
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/10)	0,372

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,719 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan *Transparansi Biaya*.

5. Indikator Transaksi Rahasia/Pungutan Liar

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator *Transaksi Rahasia* menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 13. Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	3	9,37
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	29	90,62
Jumlah			32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 9. Transaksi Rahasia

Menurut hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* pada Perode Triwulan I Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut :

Transaksi Rahasia	
Jumlah	119
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	3,719
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/10)	0,372

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,719 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bersih dari *Transaksi Rahasia*.

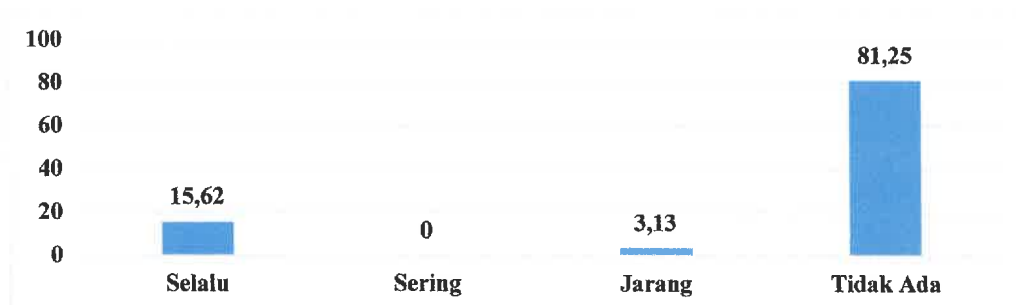
6. Indikator Hadiah

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator Transaksi Rahasia menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 14. Indeks pada Indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	5	15,62
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	1	3,13
4.	Tidak Ada	4	26	81,25
Jumlah			32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 10. Tambahan Hadiah

Menurut hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* pada Periode Triwulan I Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut :

Tambahan Hadiah	
Jumlah	112
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	3,700
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/10))	0,350

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,50 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bersih dari *Tambahan Biaya*.

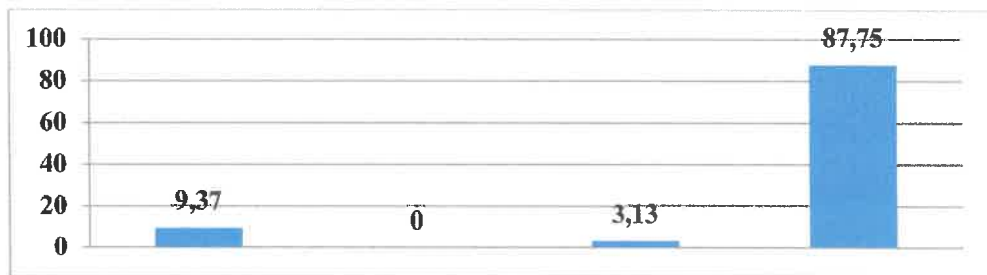
7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator *Hadiah* menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 15. Indeks pada Transparansi Pembayaran

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	3	9,37
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	1	3,13
4.	Tidak Pernah	4	28	87,75
Jumlah			32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 11. Indikator Transparansi Pembayaran

Menurut hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* pada Perode Triwulan I Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut :

Transparansi Pembayaran	
Jumlah	118
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	3,688
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/10)	0,369

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,688 berada pada kategori “Sangat baik”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bersih dari pemberian *Hadiah*.

8. Indikator Percaloan

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator Hadiah menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 16. Indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	1	3,13
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	0	0
4.	Tidak Ada	4	31	96,87
Jumlah			32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 12. Transparansi Pembayaran

Menurut hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* pada Perode Triwulan I Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut :

Percaloan	
Jumlah	125
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	3,906
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/10))	0,391

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,688 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mealkukan *Transparansi Pembayaran*.

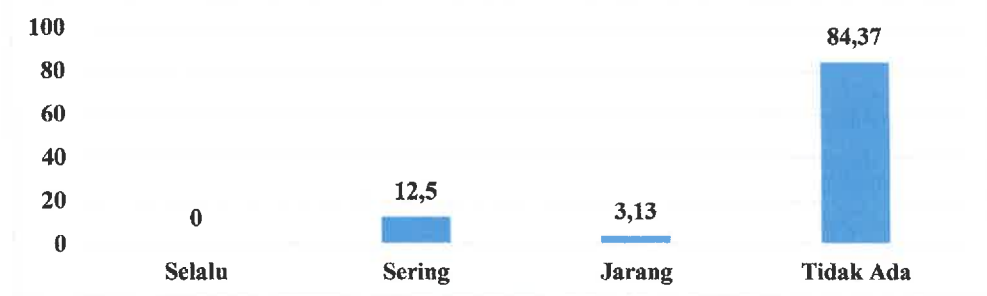
9. Indikator Praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator Hadiah menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 17. Indeks pada indikator Praktek KKN

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	4	12,5
3.	Jarang	3	1	3,13
4.	Tidak Ada	4	27	84,37
Jumlah			32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 13. Indokator Percaloan

Menurut hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* pada Perode Triwulan I Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut :

Praktek KKN	
Jumlah	119
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	3,719
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/10))	0,372

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,719 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bebas dari praktek *Percaloan*.

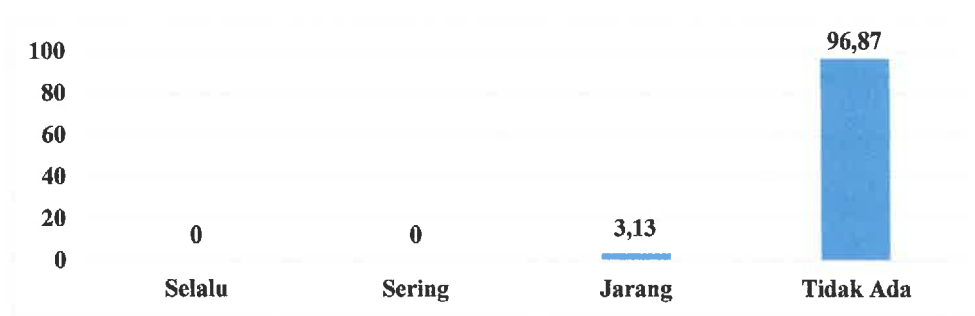
10. Indikator Intervensi Perkara.

Dari rentang jawaban hasil persepsi responden pada Indikator Hadiah menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 18. Indeks pada indikator Intervensi Perkara

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	1	0	0
2.	Sering	2	0	0
3.	Jarang	3	1	3,13
4.	Tidak Ada	4	31	96,87
Jumlah			32	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik berikut ini



Grafik 14. Intervensi Perkara

Menurut hasil perhitungan dari aplikasi *SiSuper* pada Perode Triwulan I Tahun 2026 diperoleh data sebagai berikut :

PERBUATAN CURANG	
Jumlah	127
Nilai Per RL (Jumlah Nilai – Ruang Lingkup/ Jumlah Kuisisioner)	3,397
NRR Tertimbang (NRR Per – Ruang Lingkup x (1/10))	0,397

Jika table diatas dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,397 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Indeks tersebut dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta bebas dari praktek *Perbuatan Curang*.

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

1. Pelayanan Sesuai Prosedur (Nilai: 4,000)

Nilai maksimal pada unsur ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan petugas yang tinggi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP). Kondisi ini perlu dipertahankan melalui pengawasan yang konsisten serta penguatan budaya kerja yang disiplin dan akuntabel.

2. Penyalahgunaan Jabatan (Nilai: 4,000)

Hasil survei menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang oleh petugas dalam memberikan layanan. Hal ini mencerminkan kuatnya integritas aparatur serta efektivitas pengawasan internal. Ke depan, perlu terus dilakukan penguatan sistem pengendalian internal untuk menjaga kondisi bebas dari penyimpangan ini.

3. Menjual Pengaruh (Nilai: 4,000)

Nilai yang sangat baik pada unsur ini menunjukkan bahwa tidak terdapat praktik “menjual pengaruh” dalam pelayanan. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pelayanan telah berjalan secara profesional dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu. Upaya menjaga independensi dan profesionalitas perlu terus ditingkatkan.

4. Transparansi Informasi Biaya (Nilai: 3,712)

Nilai pada unsur ini menunjukkan bahwa transparansi informasi biaya sudah cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Sebagian masyarakat masih mengalami kendala dalam memperoleh informasi biaya layanan. Hal ini dapat disebabkan oleh belum optimalnya media informasi yang tersedia, baik secara digital maupun di area pelayanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi publikasi informasi biaya secara terbuka dan mudah diakses.

5. Transaksi Rahasia / Pungutan Liar (Nilai: 3,719)

Nilai ini menunjukkan masih adanya persepsi masyarakat terhadap potensi pungutan liar. Meskipun tidak dominan, persepsi ini harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan integritas institusi. Diperlukan penguatan pengawasan, transparansi proses pembayaran, serta penyediaan kanal pengaduan yang efektif untuk mencegah praktik tersebut.

6. Hadiah (Nilai: 3,500)

Unsur ini memperoleh nilai terendah, yang menunjukkan masih adanya persepsi masyarakat terkait pemberian hadiah kepada petugas. Hal ini mengindikasikan

perlunya penguatan pemahaman baik kepada petugas maupun masyarakat mengenai larangan gratifikasi. Sosialisasi anti gratifikasi serta komitmen integritas perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

7. Transparansi Pembayaran (Nilai: 3,688)

Nilai pada unsur ini menunjukkan bahwa transparansi dalam proses pembayaran masih perlu ditingkatkan. Masyarakat belum sepenuhnya memahami alur dan mekanisme pembayaran yang berlaku. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam penyampaian informasi pembayaran serta memastikan setiap transaksi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

8. Percaloan (Nilai: 3,906)

Nilai yang cukup tinggi menunjukkan bahwa praktik percaloan relatif kecil, namun masih terdapat persepsi masyarakat terhadap keberadaan percaloan. Hal ini memerlukan perhatian melalui peningkatan pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan jasa perantara dalam pengurusan layanan.

9. Praktik KKN (Nilai: 3,719)

Nilai ini menunjukkan masih adanya persepsi masyarakat terkait praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Meskipun tidak signifikan, persepsi ini harus diminimalisir melalui penguatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses pelayanan.

10. Intervensi Perkara (Nilai: 3,969)

Nilai yang tinggi pada unsur ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai tidak terdapat intervensi dalam penanganan perkara. Hal ini mencerminkan independensi dan profesionalitas aparat peradilan. Kondisi ini perlu dipertahankan melalui pengawasan yang ketat serta penerapan kode etik secara konsisten.

C. Tindak Lanjut 3 (tiga) Unsur Terendah

1. Unsur Hadiah (Nilai: 3,500)

Unsur hadiah merupakan indikator yang mengukur persepsi masyarakat terhadap adanya pemberian dalam bentuk apapun kepada petugas sebagai bentuk imbalan atas pelayanan yang diberikan. Nilai terendah pada unsur ini menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi masyarakat terkait praktik gratifikasi.

Meskipun belum tentu terjadi secara nyata, persepsi ini dapat muncul akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap larangan pemberian hadiah kepada petugas, serta belum optimalnya sosialisasi terkait budaya anti gratifikasi di lingkungan Pengadilan.

Dari sisi internal, hal ini juga dapat disebabkan oleh belum maksimalnya internalisasi nilai-nilai integritas serta belum meratanya komitmen seluruh petugas dalam menolak segala bentuk pemberian.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan budaya anti gratifikasi melalui sosialisasi secara masif, pemasangan media informasi “No Gratifikasi”, serta penegasan komitmen integritas oleh seluruh aparatur.

Tindak Lanjut :

- Melaksanakan sosialisasi **anti gratifikasi** kepada petugas dan masyarakat
- Memasang banner/stiker “**Dilarang Memberi dan Menerima Gratifikasi**” di area strategis
- Penandatanganan **Pakta Integritas** oleh seluruh pegawai
- Penyampaian himbauan langsung oleh petugas kepada pengguna layanan
- Penguatan pengawasan oleh pimpinan

2. Unsur Transparansi Pembayaran (Nilai: 3,688)

Unsur transparansi pembayaran berkaitan dengan keterbukaan informasi dan kejelasan mekanisme pembayaran layanan. Nilai yang belum optimal menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya memahami proses dan alur pembayaran yang berlaku.

Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan media informasi yang mudah diakses, kurangnya penjelasan dari petugas, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menyampaikan informasi pembayaran.

Kurangnya transparansi berpotensi menimbulkan persepsi negatif, bahkan dapat membuka celah terjadinya penyimpangan apabila tidak dikelola dengan baik.

Untuk itu, perlu dilakukan optimalisasi penyampaian informasi pembayaran secara terbuka, baik melalui website, papan informasi, maupun penjelasan langsung oleh petugas, sehingga seluruh proses pembayaran dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat.

Tindak Lanjut :

- Menyediakan alur pembayaran yang jelas dalam bentuk banner/poster
- Mengupdate informasi biaya pada website resmi secara berkala
- Menyediakan papan informasi biaya di area pelayanan
- Meningkatkan peran petugas dalam memberikan penjelasan kepada pengguna layanan
- Mengarahkan pembayaran melalui mekanisme resmi (bank/PNBP)

3. Unsur Transaksi Rahasia / Pungutan Liar (Nilai: 3,719)

Unsur ini mengukur persepsi masyarakat terhadap adanya praktik pungutan liar atau transaksi tidak resmi dalam pelayanan. Nilai yang diperoleh menunjukkan

bahwa masih terdapat persepsi terhadap kemungkinan adanya pungutan di luar ketentuan.

Persepsi ini dapat muncul akibat kurangnya transparansi informasi biaya, belum optimalnya pengawasan internal, serta adanya pengalaman atau informasi yang diterima masyarakat dari lingkungan sekitar.

Meskipun tidak selalu mencerminkan kondisi riil, persepsi ini tetap harus menjadi perhatian utama karena berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa penguatan pengawasan, penerapan sistem pembayaran yang transparan dan terdokumentasi, serta penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses dan responsif terhadap laporan masyarakat.

Tindak Lanjut

- Penguatan **pengawasan internal** oleh pimpinan dan atasan langsung
- Penyediaan dan optimalisasi **kanal pengaduan (whistleblowing system)**
- Sosialisasi **anti pungli** kepada masyarakat
- Penerapan **pembayaran non tunai** untuk meminimalisir kontak langsung
- Penindakan tegas terhadap pelanggaran yang terbukti

D. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta sebesar 3,82%

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata – rata	Ranking
1.	Pelayanan Sesuai Prosedur	4,000	1
2.	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	2
3.	Menjual Pengaruh	4,000	3
4.	Transparansi Informasi Biaya	3,712	6
5.	Transaksi Rahasia/Pungutan Liar	3,719	7
6.	Hadiah	3,500	10
7.	Transparansi Pembayaran	3,688	9
8.	Percaloan	3,906	5
9.	Praktik KKN	3,719	8
10.	Intervensi Perkara	3,969	4

Indeks **3,82** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **95,55%**

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100	4	Bersih dari korupsi

BAB IV DATA SURVEI

A. Data Responden

	Nama/Kode Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	Meliani Dwiastuti	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	Riri Bastiani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	Fachnandita Yulia Nugrahani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	Tanti Rahayu	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	Musthafa Zaki Pasha	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	Keyla Apick Nor Aisyah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	Ade Afani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
8	Artha Shepta Wibowo	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Nisa Haryani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	Diyah Soviya Fitriani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Munawaroh	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
12	Nuriyani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	Susi Anata	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3
14	Darsono	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Winarsih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
16	Akil	4	4	4	1	1	1	1	4	2	4
17	Akil	4	4	4	1	1	1	1	4	2	4
18	Akil	4	4	4	1	1	1	1	4	2	4
19	MF	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
20	Syachradja Yudistira Ramadhan	4	4	4	4	4	1	4	1	2	4
21	Susanto	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
22	Alberta	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	Ketu Redju Srayawanda	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
24	Arif Fahmi, S.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	Prasetyaningsih	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
26	Sri Lestari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
27	Kanda Nilam Mustika	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
28	Ketut Redju Srayawanda	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
29	Arlen Faiz Akbar	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
30	BONI SATRIO SIMARMATA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
31	Christian	4	4	4	4	4	1	4	4	3	4
32	Sulistiyani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

B. Data Dukung Lainnya

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NILAI INDEKS

3,82 / 95,55 %

Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

Indeks Total	Data Indeks Persepsi			Data Nilai Persepsi			Data Layanan			Nilai Per Sesuar	Keterangan
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9		
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	128	128	128	119	119	112	118	125	119	127	
NRR Per RL	4,000	4,000	4,000	3,719	3,719	3,500	3,688	3,906	3,719	3,969	38,219
NRR Terimbang	0,400	0,400	0,400	0,372	0,372	0,350	0,369	0,381	0,372	0,387	3,822
PWA Unit Pelayanan											3,82

C. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,82 atau masuk pada kategori ***Bersih Dari Korupsi***.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **4,00**
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **4,00**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **4,00**
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,719**
5. Indikator Transaksi Rahasia/Pungutan Liar, mendapat indeks **3,719**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,500**
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,688**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,906**
9. Indikator Praktik KKN, mendapat indeks **3,719**
10. Indikator Intervensi Perkara, mendapat indeks **3,969**

D. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta. Tahun 2026 Triwulan I tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,82. atau masuk pada persepsi bebas dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator ***HADIAH, TRANSPARANSI BIAYA, PRAKTIK KKN*** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.